

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**SKRIPSI**



**OLEH :  
Siti Soimah  
(C1C010069)**

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI  
2014**

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Universitas Bengkulu  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam  
Menyelesaikan Sarjana Ekonomi**

**OLEH :  
Siti Soimah  
(C1C010069)**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BENGKULU  
2014**

**Skripsi Oleh Siti Soimah ini**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**

**Bengkulu, 25 Februari 2014**

**Pembimbing**

**Nila Aprilla, SE., M.Si., Ak., CA**  
**NIP. 19750415 200112 2 001**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Akuntansi**

**Dr. Fadi, SE., M.Si., Ak., CA**  
**NIP. 19730203 199802 1 001**



## MOTTO

Bertakwa pada Allah, maka Allah akan mengajarmu. Karena Allah maha mengetahui  
(Q.S Al-Baqarah: 282)

Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam  
kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah (Khalil Gibran).

Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya  
yang tidak diketahui orang lain (William Wordsworth).

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan  
ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran (James Thurber).

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirobilalamin, telah melimpahkan Rahmat-Nya,  
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Bapak sama Mamak, terima kasih sudah memberikan doa dan semangat untuk ku, siap  
memberikan fasilitas untuk kelancaran kuliahku, mudah-mudahan kedepannya lebih baik.  
Aminn.

Mba Ibad, Mas Agus, Mas Basrun, Mba Endang, Mas Nono, dan Mba Is. Banyak  
bantuan dari kalian, mudah-mudahan tiba saatnya nanti aku yang bantu kalian, Aminn

Adekku (Siti Komaryah) tetap belajar, berdoa, mudah-mudahan wisuda tepat waktu,  
Tetap semangat.

Keponakan ku, Novryan Cahyo Nugroho, Naufal Agung Halimantio, Rava M Yunus,  
Ghivari Fahmi Hadziq dan Danis Abid Nugraha. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang  
shaleh.

Semua keluarga yang sudah memberikan doa untuk kelancaran kuliahku, terima kasih.  
Untuk Almamater tercinta. Universitas Bengkulu.

## SPECIAL THANK

1. Untuk Bapak sama Mamak, terima kasih sudah memberikan doa dan semangat serta fasilitas untuk kelancaran kuliah ku. Tetap doakan anakmu, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Aamiin
2. Untuk mba Bad, Mas Agus, Mas Basrun, Mba Endang, Mas Nono, dan Mba Is. Banyak bantuan dari kalian, mudah-mudahan tiba saatnya nanti aku yang bantu kalian, Aamiin
3. Untuk Adekku Ryah, maaf kadang dapat juteknya. Mudah-mudahan wisuda tepat waktu.
4. Untuk Nadya, Yulia (Lia), Wiwin. Sudah direpotkan malam-malam. Dwi (Hil), dan Selvi (Kanjeng), terima kasih atas kebersamaan kalian untuk melewati langkah demi langkah menyelesaikan kuliah. Maaf sudah menjadi sasaran keegoisan ku. Semoga kita tetap bisa bertemu. Sukses buat kalian!
5. Untuk teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2010 (kelas A dan Kelas B), yang gak bisa disebut satu persatu. Sukses buat kita semua Aamiin
6. Untuk My PVONG dan Dudup terima kasih banyak, udah mau denger semua curhatanku dan membantu aku kesana kemari, sekali kali jadi Bank kalo lagi butuh duit. Terima kasih sudah sabar, sering nasehatin juga, memberikan aku pelajaran. Banyak yang udah saling dibagi dan saling bantu, mudah-mudahan masih tetap berlanjut untuk semuanya.
7. Untuk keluarga kecil dari Karang Nanding, Karang Tinggi, Bengkulu Tengah. Oom Penri, Arif, Alvin, Angga, Iyan, Mba Ida, Dian, Neneng. Terima kasih buat kebersamaan melewati KKN. Sukses juga buat kalian.
8. Untuk Mas Yogo, Ayuk Ruci yang sudah membantu banyak untuk distribusi kuesioner. Terima kasih mas.
9. Untuk mba Endry, terima kasih atas bantuannya. Maaf mba merepotkan.
10. Untuk Wiwit, Novi, Rizka, Yuli (Sahabat dari SMP) yang sering memberikan hiburan lewat telfon. Terima kasih



---

---

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Yang diajukan untuk diuji pada tanggal 25 Februari 2014, adalah hasil karya saya.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri berarti gelar dan Ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

**Bengkulu, Tanggal 25 Februari 2014  
Yang membuat pernyataan,**

**Siti Soimah**

**THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE CAPACITY, THE UTILIZATION  
OF INFORMATION TECHNOLOGY AND GOVERNMENT INTERNAL  
CONTROL SYSTEM ON THE QUALITY OF FINANCIAL  
STATEMENTS AT THE REGIONAL GOVERNMENT  
OF NORTH BENGKULU**

**By**

Siti Soimah <sup>1)</sup>

Nila Aprilla <sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

This research was aimed to determine the effect of human resource capacity, utilization of information technology and government internal control system on the quality of financial statements at the regional government of North Bengkulu. This research used a quantitative approach, using primary data through questionnaires. Respondents of this research were 28 SKPD of part of a financial manager at the regional government of North Bengkulu. The Variables in this research is the capacity of human resources, the utilization of information technology and government internal control system as independent variables, as well the quality of local government financial statements as the dependent variable. The data were analyzed with multiple regression method. The results of hypothesis shown that the capacity of human resources, the utilization of information technology and government internal control system give the impact add it was positive and significant to the quality of financial statements at the Regional Government of North Bengkulu.

**Keywords:** *Quality of Government Financial Statement, Human Resource Capacity, Utilization of Information Technology and Government Internal Control System.*

1) Student

2) Supervisor

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**Oleh**

Siti Soimah <sup>1)</sup>

Nila Aprilla <sup>2)</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah bagian pengelola keuangan dari 28 SKPD Kabupaten Bengkulu Utara. Variabel dalam penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel bebas, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikat. Analisis data menggunakan metode statistik analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

**Kata Kunci :** *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

1) Mahasiswi

2) Dosen Pembimbing

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu bagian untuk memenuhi prasyarat agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nila Aprilla, SE., M.Si., Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan masukan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak
2. Bapak Prof. Lizar Alfansi, S.E., MBA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
3. Dr. Fadli, S.E., M.Si Ak, CA dan Ibu Lismawati, S.E., M.Si., Ak, CA selaku ketua dan sekretaris jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
4. Bapak Baihaqi, SE., M.Si., Ak, CA, Bapak Robinson, SE.,M.Si., Ak, CA, dan Ibu Fenny Marietza, SE., M.Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun.
5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu terima kasih atas bantuannya selama ini.
6. Pengelola keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Bengkulu Utara yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua ku, Bapak Suparjo dan Ibu Nisah, yang tidak pernah henti berdoa dan memberikan semangat untuk kelancaran kuliah ku.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 yang sedikit banyaknya sudah membantu saya dan sama-sama melewati tahap demi tahap untuk mendapat gelar sarjana.
9. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka dari itu penulis mengharapkan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Bengkulu, Februari 2014  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN SPECIAL THANKS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGARNTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan .....	7
1.4 Manfaat.....	8
1) Teoritis .....	8
2) Praktis.....	8
1.5 Batasan Masalah .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan .....	10
2.2 Kualitas Laporan Keuangan .....	12
2.3 Kapasitas Sumber Daya Manusia .....	13
2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	16
2.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	19
2.6 Penelitian Terdahulu.....	25
2.7 Pengembangan Hipotesis.....	32
2.7.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	32
2.7.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	33
2.7.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	35
2.8 Kerangka Pemikiran .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Definisi Operasional Variabel .....	37
3.2.1 Variabel Independen .....	37
3.2.1.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ) .....	37
3.2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_2$ ).....	38

3.2.1.3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_3$ ) .....	38
3.2.2	Variabel Dependen.....	39
3.2.2.1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) .....	39
3.3	Populasi dan Sampel.....	40
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	40
3.5	Metode Analisis Data .....	41
3.5.1	Uji Kualitas Data.....	41
a.	Uji Reliabilitas.....	41
b.	Uji Validitas.....	41
3.5.2	Uji Asumsi Dasar .....	42
3.5.2.1	Uji Normalitas Data.....	42
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas.....	42
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas .....	42
3.5.3	Alat Analisis Data .....	43
3.5.4	Pengujian Hipotesis.....	44
3.5.4.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	44
3.5.4.2	Uji Simultan (Ftest) .....	44
3.5.4.3	Uji Statistik t (t-test) .....	44

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Hasil Penelitian.....	45
4.1.1	Deskripsi Data.....	45
4.1.2	Gambaran Umum Responden .....	47
4.1.3	Statistik Deskriptif .....	49
4.1.4	Hasil Uji Kualitas Data .....	54
4.1.4.1	Hasil Uji Validitas.....	54
4.1.4.2	Hasil Uji Reliabilitas.....	55
4.1.5	Hasil Uji Asumsi Dasar.....	56
4.1.5.1	Hasil Uji Normalitas .....	56
4.1.6	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	57
4.1.6.1	Hasil Uji Multikolinearitas .....	57
4.1.6.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	58
4.2	Hasil Uji Hipotesis .....	58
4.3	Pembahasan .....	61
4.3.1	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	61
4.3.2	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	62
4.3.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	64

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Implikasi Hasil Penelitian.....	66
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	67
5.4 Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 4.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 4.3 Gambaran Umum Responden.....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 4.4 Deskriptif Statistik Responden .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 4.5 Rata-Rata Distribusi Frekuensi Jawaban Responden .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 4.6 Frekuensi Jawaban Responden.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas .....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas .....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis .....</b>	<b>59</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1. Kerangka pemikiran ..... 36**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b>	<b>Kuesioner Penelitian</b>
<b>Lampiran 2</b>	<b>Hasil Tabulasi Data Jawaban Responden</b>
<b>Lampiran 3</b>	<b>Statistik Deskriptif</b>
<b>Lampiran 4</b>	<b>Hasil Uji Kualitas Data</b>
<b>Lampiran 5</b>	<b>Hasil Uji Asumsi Dasar</b>
<b>Lampiran 6</b>	<b>Hasil Uji Asumsi Klasik</b>
<b>Lampiran 7</b>	<b>Hasil Uji Hipotesis</b>
<b>Lampiran 8</b>	<b>Surat Izin Penelitian</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik.

Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda, sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pengguna laporan keuangan berasal dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain (PP 71

Tahun 2010): masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Kegunaan atau kebermanfaatan (*usefulness*) dapat ditentukan secara kualitatif. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai. Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai metode untuk dapat mengawasi dan memberikan keyakinan tercapainya tujuan suatu organisasi menjadi penting, sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat terlaksana.

Menurut Yosefrinaldi (2013), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman

yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Sebagai wujud dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia merupakan elemen dari organisasi yang memiliki peran sangat penting. Sehingga harus dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya pencapaian yang dimaksud oleh organisasi bersangkutan. Menurut Yosefrinaldi (2013), dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Selain sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan. Hasil penelitian Andriani menyebutkan bahwa, pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi akan meningkatkan ketepatanwaktuan LKPD.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Selain wajib untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya (PP 60 Tahun 2008): (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. Dalam PP 60 tahun 2008, seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan Intern.

Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (Armando, 2013).

Arfianti (2011) menyebutkan bahwa, selain kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum maksimal, Badan Pemeriksaan Keuangan juga menemukan adanya kasus dugaan korupsi. Pada pemeriksaan semester II tahun 2008, ada 11 dugaan tindak pidana yang dilaporkan ke KPK, 6 diantaranya terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Disamping itu, sekitar 683 objek pemeriksaan yang diperiksa oleh BPK, hampir separuhnya didominasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian LKPD dari waktu yang telah ditentukan. Adapun LKPD yang terlambat berjumlah

191 dari total 469 pemerintah daerah. Dengan demikian hanya 275 pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD secara tepat waktu.

Berdasarkan berita BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 disebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut mengungkapkan bahwa Kabupaten Bengkulu Utara dapat meningkatkan opininya dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di TA 2011 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di TA 2012. Dengan adanya peningkatan opini tersebut, apakah laporan keuangan yang diterbitkan juga menunjukkan adanya kualitas yang baik sehingga dapat dipergunakan dengan banyak tujuan dari pengguna yang berbeda. Namun, berdasarkan berita yang dimuat [antaranews.com](http://antaranews.com) Bengkulu (2013) yang mengungkapkan masih adanya tuntutan dari elemen masyarakat untuk mengungkap kasus dugaan korupsi dana pembangunan dan suap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya sistem pengendalian intern dalam pemerintahan.

Ariesta (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah studi pada Satuan Kerja Perangkat daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan, serta pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin baik kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan Yosefrinaldi (2013) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian diatas, topik tersebut menarik untuk dijadikan sebagai judul penelitian, dan menjadikan penelitian Ariesta dan Yosefrinaldi sebagai rujukan. Maka judul dari penelitian ini adalah:

**“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

- 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 3) Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji secara empiris :

- 1) Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.4 Manfaat**

#### **1). Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

## **2). Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan serta menambah literatur perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini tidak dilakukan pada proses pelaporan keuangan, namun ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada pengujian terhadap tiga faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah. Kapasitas sumber daya manusia yaitu kemampuan individu/pegawai untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya melalui latar belakang pendidikan, tanggungjawab, pelatihan dan pengalaman. Pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola keuangan, meliputi pemanfaatan komputer dan jaringan internet. Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Penelitian dilakukan pada SKPD Kabupaten Bengkulu Utara.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Empat karakteristik kualitatif tersebut diantaranya :

1) Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memnuhi karakteristik berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## **2.2 Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan (Yosefrinaldi, 2013). Mahmudi (2010) mengatakan, memang laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Terdapat informasi lain selain informasi akuntansi yang juga sangat membantu, misalnya laporan statistik, proyeksi dan prospektus, berita dimedia, hasil penelitian terkait dan sebagainya. Namun, keberadaan informasi

keuangan tidak dapat diabaikan dan dihilangkan begitu saja, karena tanpa informasi tersebut keputusan yang diambil menjadi kurang berkualitas.

Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal (Ariesta, 2013). Arfianti (2011) juga mengemukakan bahwa, informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang diisyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang memenuhi kualitas yang dikehendaki antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010): 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami

Menurut Darwanis dan Mahyani (2009), dalam penyusunan informasi yang perlu diperhatikan adalah informasi tersebut dapat mendukung suatu keputusan, sehingga informasi yang disajikan benar-benar dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan. Akurasinya informasi keuangan dapat diidentifikasi dari rendahnya tingkat kesalahan yang akan digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan.

### **2.3 Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Darwanis & Mahyani (2009), manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Karena, manusia merupakan elemen yang

selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi, serta manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi.

Menurut Zuliarti (2012), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau kelembagaan dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektifitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan suatu keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Yosefrinaldi, 2013).

Menurut Alimbudiono & Fidelis (2004) dalam Indriasari & Nahartyo (2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan

dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Griffin, 2004 dalam Delanno & Deviani, 2013 sumber daya manusia dapat diukur melalui rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Indriasari dan Nahartyo, 2008). Menurut Riandi (2012) keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia sangat penting karena ketiga hal ini merupakan hal pokok yang harus dimiliki. Kualitas dari laporan keuangan yang disusun, dikelola dan dilaporkan sangat bergantung kepada tiga hal ini. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan

yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga (Zuliarti, 2012).

Untuk menunjang tercapainya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, organisasi atau instansi dapat memberikan pelatihan kepada karyawannya dengan tujuan agar tercapai efektifitas kinerja dan tujuan organisasi. Manfaat dan pentingnya pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya semata-mata dapat dinikmati manfaatnya oleh karyawan yang mengikuti pelatihan, namun dapat dirasakan oleh organisasi melalui meningkatnya kinerja tersebut maka menaikkan pula kinerja organisasi (Notoatmodjo, 2009). Menurut Darwanis & Mahyani (2009) bahwa kapasitas sumber daya manusia menunjang organisasi dalam karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan organisasi dapat dicapai.

Sesuai dengan penjelasan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting. Karena sumber daya manusia akan berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan dari proses awal hingga akhir. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia juga berhubungan langsung dengan kesesuaian laporan keuangan yang disajikan terkait dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Jadi informasi yang disajikan itu sangat bergantung kepada sumber daya manusia dalam hal ini yaitu pegawai.

#### **2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi merupakan mesin untuk menjalankan sistem informasi. Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data,

menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu komputer, penyimpan data diluar (*auxiliary storage*), telekomunikasi, dan perangkat lunak (*software*) (Mulyadi, 2010).

Definisi teknologi informasi menurut Darwanis & Mahyani (2009) dalam penelitiannya adalah teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), menampilkan (*represent*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi. Pengembangan sistem informasi yang sesuai memerlukan perpaduan dari berbagai pengetahuan tentang sistem komputer, sistem informasi dan pengetahuan tentang bagaimana merancang dan menerapkan sebuah sistem informasi serta bagaimana memperoleh sistem komputer yang diperlukan.

Menurut Indriasari & Nahartyo (2008), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Memfaatkan kemajuan teknologi tidak hanya dalam teknologi komputer. Jaringan internet juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya dengan kemudahan untuk mengakses profil pemerintah daerah melalui situs resmi

pemerintah daerah terkait. Dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk menampilkan profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Selain akses profil pemerintah daerah yang terkait, dalam situs resmi tersebut masyarakat dapat mengakses mengenai informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga telah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 bahwa, penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diinformasikan melalui situs resmi pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk mempermudah kerja pegawai. Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010).

Pemanfaatan teknologi informasi termasuk didalamnya pengolahan data, pengolahan informasi, serta proses kerja secara elektronik dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan adanya kemudahan dan kemurahan untuk mengakses informasi keuangan. Selain itu, pengolahan data

dengan bantuan komputer jelas akan mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan. Sebagai contoh penerapan pemanfaatan teknologi didalam sektor publik selain memberikan kemudahan dalam mengakses data keuangan antara lain, membantu proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Banyak kemudahan yang didapat jika menggunakan komputer, contoh sederhananya adalah hasil output pengolahan data lebih rapi jika dilakukan secara otomatis. Selain itu, proses pengolahan data dan transaksi ekonomi akan lebih cepat, dapat mempersingkat waktu. Sedangkan kelemahannya menurut Yosefrinaldi (2013), sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

## **2.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Krismiaji (2005) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat, memperbaiki efisiensi, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2010), sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang didalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 disebutkan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP ini dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*intern accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam organisasi dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010).

Adapun unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan PP 60 tahun 2008 antara lain :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian resiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan pengendalian intern.

Disebutkan pula dalam PP 60 tahun 2008 bahwa dalam pelaksanaannya, unsur SPIP tersebut dilaksanakan menjadi suatu bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Dalam unsur lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif serta melalui hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Unsur pengendalian intern yang kedua yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan. Kemudian mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko (PP 60 tahun 2008).

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah

untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko (PP 60 tahun 2008). Mahmudi (2010) menyebutkan, komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian intern khususnya kegiatan pengendalian antara lain :

a. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah meliputi :

- 1) Sistem dan prosedur penerimaan kas
- 2) Sistem dan prosedur pengeluaran kas
- 3) Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
- 4) Sistem dan prosedur akuntansi aset

b. Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah dan ilegal.

c. Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d. Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pemegang uang dengan pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Dijelaskan pula dalam PP 60 tahun 2008, bahwa instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

Unsur pengendalian intern berdasarkan PP 60 tahun 2008 yang kelima yaitu pemantauan pengendalian intern. Pemantauan SPI dilaksanakan melalui

pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas SPI yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Jadi, Pengendalian Intern dapat dikatakan sebagai suatu proses yang telah dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintahan. Selain itu, pengendalian intern bermaksud untuk memberikan keyakinan atas pencapaiannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Indriasari & Nahartyo (2008) dengan judul penelitian “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Variabel yang digunakan adalah Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi, sebagai variabel independen dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan pada SKPD di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan jumlah sampel sebanyak 117 orang. Hasil yang ditunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern

akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif. Pemanfaatan teknologi informasi, dan kapasitas SDM memiliki pengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Winidyanigrum & Rahmawati (2010) dengan judul “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi empiris di Pemda Subosukawonosraten)”. Variabel yang digunakan adalah Sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen. Keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependennya. Serta pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan pada pengelola SKPD di Pemerintah Daerah Susbosukawonosraten dengan jumlah responden sebanyak 511 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kemudian Yudianta & Erawati (2012) dengan judul “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Variabel yang digunakan adalah sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengendalian intern sebagai variabel independen.

Kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada fungsi akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD Kabupaten Gianyar. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi pelaporan keuangan.

Penelitian Zuliarti (2012) dengan judul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus”. Variabel yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel independen. Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Kudus, dengan jumlah responden sebanyak 102 untuk 34 SKPD. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)”. Variabel yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen. Pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sumatera Barat. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 95 responden dari 19 DPKAD dengan asumsi setiap DPKAD memiliki 5 orang kepala bagian dan staf akuntansi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kemudian Ariesta (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat”. Variabel yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel independen, serta nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada bagian akuntansi/penatausahaan SKPD Pasaman Barat. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan, serta pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan.

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Delanno & Deviani (2013) dengan judul “Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Variabel yang digunakan adalah kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan pengawasan keuangan sebagai variabel independen. Serta nilai informasi pelaporan keuangan daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada SKPD kota Padang, dengan responden kepala bagian dan staf akuntansi yang berjumlah 90 responden. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah, pemanfaatan TI berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah serta pengawasan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi untuk penelitian ini tertuang dalam table berikut ini:

**Tabel.2.1**  
**Daftar Penelitian Sebelumnya**

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1.	Desi Indriasari dan Ertambang Nahartyo	2008	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir).	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif. Pemanfaatan teknologi informasi, dan kapasitas SDM memiliki pengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Celviana Winidyaningrum & Rahmawati	2010	Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi empiris di Pemda Subosukawonosraten).	Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3.	I Gede Agus Yudianta & Ni Made Adi Erawati	2012	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi

				pelaporan keuangan.
4.	Zuliarti	2012	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah abupaten Kudus.	kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Yosefrinaldi	2013	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (studi Empiris pada Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat).	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6.	Fadila Ariesta	2013	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi informasi, dan pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah	Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan. Pengendalian intern

			Daerah studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.	akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan.
7.	Galuh Fajar Delanno & Deviani	2013	Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.	Kapsitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Daerah.

## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sumber daya manusia adalah seseorang atau individu yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki keahlian dibidangnya, maka akan menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanaan fungsi akuntansi. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi buruk. Hal ini menunjukkan

bahwa kemampuan sumber daya manusia yang baik, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Yudianta & Erawati (2012) dengan hasil kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Yosefrinaldi (2013) menemukan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ariesta (2013), hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan. Delanno & Deviani (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai pelaporan keuangan daerah. Semakin baik kapasitas sumber daya manusia, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.7.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa, untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan

mengelola keuangan daerah, dan Menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka semakin baik pemanfaatan teknologi informasi akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Indriasari dan Nahartyo (2008) mengatakan bahwa penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Hasil penelitiannya juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan. Berdasarkan hasil penelitian Winidyaningrum & Rahmawati (2010), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Zuliarti (2012), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Yosefrinaldi (2013) dengan

hasil penelitian yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.7.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengendalian intern adalah suatu tindakan pimpinan dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, andal, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2010). Masih ditemukannya penyimpangan dalam pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik yang diisyaratkan yaitu, keterandalan. Pengendalian internal merupakan cara yang dapat memberikan arahan serta mengawasi sumber daya suatu organisasi serta memiliki peran dalam pencegahan penggelapan atau *fraud* dan melindungi sumber daya organisasi. Menurut Ariesta (2013), hasil evaluasi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Yudianta & Erawati (2012) pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Zuliarti (2012) bahwa, pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Delanno & Deviani (2013), dengan hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Penelitian Yosefrinaldi (2013) menemukan hasil bahwa, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

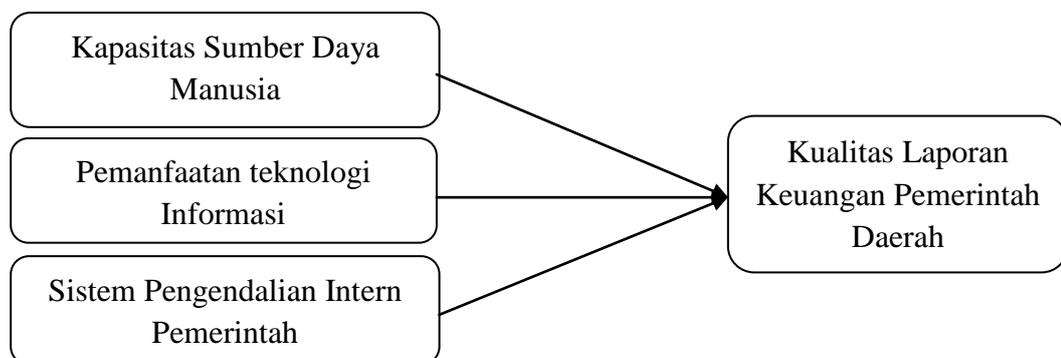
**H<sub>3</sub> : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah :

**Gambar 1 : Kerangka Pemikiran**

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010).

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

##### **3.2.1 Variabel Independen**

###### **3.2.1.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ )**

Sumber daya manusia adalah penyangga untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi. Kemampuan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja yang menghasilkan *outcomes*. Indikator variabel kapasitas sumber daya manusia dilihat dari Pendidikan, Tanggungjawab, Pelatihan, dan Pengalaman. Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia diukur dengan instrumen penelitian Ariesta (2013) yang telah dimodifikasi kalimat pernyataannya dan menambah beberapa pernyataan dari instrumen yang pernah digunakan oleh Yosefrinaldi (2013).

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 TS (Tidak Setuju), artinya kapasitas sumber daya manusia sangat rendah. Skala 2 TS (Tidak Setuju), artinya kapasitas sumber daya manusia

rendah. Skala 3 N (Netral), artinya kapasitas sumber daya manusia telah cukup. Skala 4 S (Setuju), artinya kapasitas sumber daya manusia tinggi. Skala 5 SS (Sangat Setuju), artinya kapasitas sumber daya manusia sangat tinggi.

### **3.2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>2</sub>)**

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah. Indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi dilihat dari penggunaan komputer dan jaringan internet. Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan instrumen penelitian Ariesta (2013) yang telah dimodifikasi kalimat pernyataannya.

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 TP (Tidak Pernah), artinya pemanfaatan teknologi informasi sangat rendah. Skala 2 JS (Jarang Sekali), artinya pemanfaatan teknologi informasi rendah. Skala 3 KK (Kadang-Kadang), artinya pemanfaatan teknologi informasi telah cukup. Skala 4 S (Sering), artinya pemanfaatan teknologi informasi tinggi. Skala 5 SS (Sangat Sering), artinya pemanfaatan teknologi informasi sangat tinggi.

### **3.2.1.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X<sub>3</sub>)**

Pengendalian intern adalah suatu proses untuk memberikan arahan dan pengawasan serta memberikan keyakinan dan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator variabel sistem pengendalian intern

pemerintah dilihat dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah diukur dengan instrumen penelitian Ariesta (2013) yang telah dimodifikasi kalimat pernyataannya dan menambah beberapa pernyataan dari instrumen yang pernah digunakan oleh Yosefrinaldi (2013).

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 TP (Tidak Pernah), artinya sistem pengendalian intern pemerintah sangat rendah. Skala 2 JS (Jarang Sekali), artinya sistem pengendalian intern pemerintah rendah. Skala 3 KK (Kadang-Kadang), artinya sistem pengendalian intern pemerintah telah cukup. Skala 4 S (Sering), artinya sistem pengendalian intern pemerintah tinggi. Skala 5 SS (Sangat Sering), artinya sistem pengendalian intern pemerintah sangat tinggi.

### **3.2.2 Variabel Dependen**

#### **3.2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Variabel kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah diukur dengan instrumen penelitian Ariesta (2013) yang telah dimodifikasi dan menambah beberapa pertanyaan dari instrumen yang pernah digunakan oleh Yosefrinaldi (2013).

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 TP (Tidak Pernah), artinya kualitas laporan keuangan sangat rendah. Skala 2 JS (Jarang Sekali), artinya kualitas laporan keuangan rendah. Skala 3 KK (Kadang-Kadang), artinya kualitas laporan keuangan telah cukup. Skala 4 S (Sering), artinya kualitas laporan keuangan baik. Skala 5 SS (Sangat Sering), artinya kualitas laporan keuangan sangat baik.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan dari 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan kriteria responden adalah pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan adalah data primer. Dimana data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Indriantoro & Supomo (2002). Metode pengumpulan

data yang digunakan adalah dengan mendatangi secara langsung kantor SKPD Kabupaten Bengkulu Utara dan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden, yaitu PPTK, PPK, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Dalam pengumpulan data, peneliti menunggu responden menjawab semua kuesioner yang telah disediakan sebelumnya. Untuk dapat menyelesaikan penyebaran kuesioner tersebut, peneliti memperkirakan waktu selama 2 minggu.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Uji Kualitas Data**

##### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan koefisien korelasi *Pearson correlation*. Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05 atau 0,01 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2011).

##### **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ),

yaitu suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0.70 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2011).

### **3.5.2 Uji Asumsi Dasar**

#### **3.5.2.1 Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas yang digunakan yaitu *kolmogrov-smirnov* dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila  $p\text{-kolmogrov-smirnov test} > 0,05$  (Ghozali, 2011).

### **3.5.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.5.3.1 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai *VIF (Variance Inflation Factors)* dan nilai toleransi. Jika nilai toleransi > 0,10 atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ , artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas (Ghozali, 2011).

#### **3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan metode Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2011) dengan persamaan regresi :

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

#### 3.5.4 Alat Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan *Software SPSS (Statistical Package For Social Science)*. Analisis regresi berganda menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien korelasi

$X_1$  = Kapasitas Sumber Daya Manusia

$X_2$  = Pemanfaatan Teknologi Informasi

$X_3$  = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

e = variabel lain yang mempengaruhi

### **3.5.5 Pengujian Hipotesis**

#### **3.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai  $R^2$  mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan *Adjusted-R<sup>2</sup>* karena nilai *Adjusted-R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Semakin tinggi nilai *Adjusted-R<sup>2</sup>* maka semakin tinggi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

#### **3.5.5.2 Uji Simultan (Ftest)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dengan tingkat signifikan sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

#### **3.5.5.3 Uji Statistik t (t-test)**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi secara parsial (uji t). uji statistik t pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara signifikan. Jika probabilitas sig.  $< 0,05$  maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).